

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada dasarnya dunia internasional mengalami suatu perubahan yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Perubahan tersebut ditandai dengan munculnya beragam aktor internasional dan semakin kompleksnya suatu isu yang tidak dapat diselesaikan oleh negara. Dalam bagian isu, masyarakat internasional tidak lagi terfokus pada *high politics*, seperti militer, ideologi dan keamanan. Akan tetapi kategori isu yang bersifat *low politics* justru menjadi *concern* saat ini. Kemudian ancaman keamanan juga turut memberikan dampak terhadap perdamaian global. Sehingga konflik identitas komunal yang basisnya agama, etnis dan kesukuan menjadi ancaman tersendiri. Dalam artian, agama dapat memainkan peran penting dalam politik global sebagai sumber identitas dan legitimasi (XU, 2012).

Dinamika yang sangat dinamis ini menyebabkan setiap manusia harus mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi global saat ini. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara memiliki kewenangan untuk mengatur setiap warganya. Akan tetapi terkadang kebijakan yang digunakan oleh rezim yang berkuasa memunculkan rasa kecewa bahkan dapat berkontribusi dalam menciptakan konflik yang berkepanjangan. Sehingga konflik merupakan salah satu unit analisis dalam kajian ilmu hubungan internasional. Oleh karenanya perubahan tatanan politik internasional juga dihadapi oleh dunia Islam dimana konflik, separatisme, Islamophobia dan terorisme semakin merajalela (Dauda, 2021).

Konflik merupakan salah satu fenomena dalam hubungan internasional yang mungkin tidak dapat dihindari. Jika terdapat konflik memungkinkan untuk dikelola dengan sedemikian rupa. Tujuan pengelolaan konflik di dunia internasional saat ini tentu tidak terlepas dari adanya berbagai ancaman yang berkelanjutan terhadap keberadaan aktor negara maupun non-negara dalam menjalankan aktivitasnya. Apabila konflik tidak bisa dikelola dengan baik, maka pelembagaan konflik akan semakin luas dan sulit untuk diselesaikan.

Dalam memahami konflik dapat melihat dari gagasan Johan Galtung dalam kaitannya untuk menentukan sebab konflik sebagai upaya untuk mencari solusi (Webel & Galtung, 2007). Menurut Johan Galtung untuk mengetahui bagaimana konflik yang terjadi dalam tatanan masyarakat muncul disebabkan karena adanya perbedaan dalam memandang sesuatu (*attitude*), perbedaan cara pandang yang kemudian diikuti oleh tindakan tertentu yang direspon oleh kelompok lainnya sebagai ajakan untuk berkonflik (*behavior*), hal lainnya yang menyebabkan adanya konflik adalah adanya isu-isu yang tidak mampu dijelaskan secara luas dalam masyarakat tentunya akan memunculkan ruang kontradiksi sehingga semakin luasnya ruang kontradiksi tersebut maka potensi munculnya konflik akan semakin besar.

Salah satu konflik yang menarik perhatian internasional yaitu konflik antara pemerintah Tiongkok dengan etnis Uyghur yang mayoritas beragama Islam. Konflik yang terjadi di ranah domestik Tiongkok dapat menyebabkan ketidakstabilan secara politik dan keamanan. Sebab konflik yang dikategorisasikan sebagai konflik *intra-state* ini bagi pemerintah Tiongkok dapat menjadi ancaman keutuhan dan kedaulatan negaranya. Sebab kepetingan yang diinginkan oleh etnis Uyghur adalah keinginan untuk memisahkan diri (separatisme) dari Tiongkok. Sedangkan, Tiongkok tidak ingin melepaskan wilayah Xinjiang karena terdapat kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Hal ini dapat dilihat bahwa situasi ketegangan politik khususnya di Xinjiang mempengaruhi negara-negara perbatasan yang memiliki potensi keuntungan ekonomi secara geopolitik. Maka dari itu, pemerintah Tiongkok secara tegas menjadikan perbatasan Xinjiang dengan Rusia sebagai proyek potensial pengembangan kilang minyak dan gas bumi (Israeli, 2010).

Kemudian peristiwa yang menjadi sorotan adalah Kerusuhan Urumqi 2009 yang juga merupakan salah satu kerusuhan terbesar di Tiongkok (Beauchamp-Mustafaga, 2019). Kerusuhan ini melibatkan demonstrasi yang anarkis antara etnis Han dengan Uyghur. Adapun korban jiwa dalam kerusuhan ini berjumlah 1700 orang yang mengalami luka-luka (M. Clarke, 2010).

Faktanya juga dapat dibuktikan bahwa sejak tahun 1990 beberapa serangan yang ditujukan terhadap pemerintah Tiongkok terkait dengan organisasi Turkestan Timur yang dilabeli olehnya sebagai organisasi terorisme untuk

mendirikan negara Islam di Xinjiang (Shichor, 1979). Klaim yang disampaikan oleh pemerintah Tiongkok tersebut tentu membuat situasi di wilayah Xinjiang semakin kompleks. Namun pemerintah Tiongkok juga sulit untuk mengetahui sebenarnya siapa yang memobilisasi serangan tersebut akan tetapi justru menargetkan pada etnis Uyghur.

Menurut pemerintah Tiongkok apabila etnis Uyghur diberikan kemerdekaan untuk mendirikan negara merdeka tentu dipandang sebagai ancaman dalam negeri. Sehingga pemerintah Tiongkok menyikapi hal tersebut dengan tindakan represif yang pada akhirnya akan semakin memperkeruh situasi dan kondisi khususnya di wilayah Xinjiang itu sendiri. Dalam merespon serangan tersebut pemerintah Tiongkok menggunakan upaya koersif sebagai bentuk *self-defence* (pembelaan diri) dari ancaman kelompok separatis dan tidak akan membiarkan satu wilayahnya untuk lepas. Kemudian sikap keras pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uyghur karena dianggap rentan terpapar paham radikalisme dan dianggap sebagai kelompok terorisme. Adapun dampak dari sikap represif pemerintah Tiongkok menyebabkan konflik semakin memanas.

Kompleksitas permasalahan Uyghur memang sudah terjadi sejak lama dan diketahui oleh masyarakat internasional. Pasalnya, kontroversi kebijakan dari pemerintah Tiongkok melalui Partai Komunis China (PKC) khususnya di Xinjiang yang mendapatkan perhatian khusus. Adapun kebijakan yang diterapkan meliputi peningkatan anggaran keamanan, rekrutmen polisi dan diterapkannya kamera pengintai (Cumming-Bruce, 2018). Kebijakan ini diperlukan untuk mengatasi mobilisasi separatis Uyghur dan sebagai bentuk operasi keamanan secara menyeluruh.

Dalam perkembangannya muncul klaim-klaim yang menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok dianggap melakukan pembantaian massal (genosida) terhadap Uyghur yang diaktualisasikan dengan penahanan dan pengawasan massal (Flaherty, 2021). Tindakan ini tentunya menjadi beban mental bagi Uyghur sebab mempengaruhi mobilitasnya khususnya dalam melakukan praktik keagamaan. Namun pemerintah Tiongkok menolak tuduhan tersebut karena itu hanyalah rumor yang tidak masuk akal dan memiliki motif untuk menyudutkan Tiongkok (Davidson, 2021). Pada akhirnya akan menimbulkan sentimen anti Tiongkok itu sendiri.

Dengan adanya dugaan praktik kekerasan yang dilakukan pemerintah Tiongkok terhadap Uyghur berkaitan dengan pemenuhan nilai-nilai hak asasi manusia. Seharusnya setiap individu mendapatkan hak-hak atau kebebasan dari intervensi pemerintah. Tentu seseorang akan diberikan penikmatan terhadap hak asasi manusia karena martabatnya sebagai manusia itu sendiri daripada diberikan oleh hukum positif khususnya terhadap kelompok minoritas. Bahkan penderitaan juga didapatkan Muslim Uyghur sejak peristiwa 9/11 dimana gerakan separatisme anti pemerintahan di Xinjiang diakomodir oleh jaringan teroris Osama bin Laden (Council on Foreign Relations, 2014).

Muncul berbagai pandangan dalam melihat permasalahan Uyghur yang menjadi sorotan dunia internasional khususnya di internal kelembagaan PBB dalam *UN Committee Session* (Tiezzi, 2019). Di satu sisi, PBB mengutuk pemerintah Tiongkok untuk tidak bertindak secara sewenang-wenang terhadap Uyghur yang mengarah pada pelanggaran HAM. Di sisi lain, PBB mendukung pemerintah Tiongkok untuk mengelola permasalahan Uyghur dalam konteks deradikalisasi dan kontra terorisme.

Adanya perbedaan pandangan ini menunjukkan sikap kehati-hatian PBB dalam menanggapi permasalahan domestik dan berusaha untuk tidak menyalahkan Tiongkok walaupun mendapatkan kecaman dari berbagai negara. Akan tetapi selama ini separatisme Uyghur telah menimbulkan problem keamanan bagi Tiongkok maupun etnis Uyghur itu sendiri. Berdasarkan permasalahan tersebut menjadi alasan penulis untuk dapat melakukan analisis ketidakefektifan politik separatisme Uyghur di Tiongkok.

Secara sederhana tulisan ini akan menggunakan gagasan yang dicetuskan oleh Imam Al-Ghazali. Memang Imam Al-Ghazali dikenal sebagai cendekiawan dan ulama yang sangat terkenal serta menjadi rujukan hingga berabad lamanya. Sehingga Imam Al-Ghazali semakin diperhitungkan dalam sebagai ilmuwan berpemikiran cemerlang dan berpengaruh dalam peradaban Islam. Sebab, beliau memiliki kemampuan dan kecerdasan menguasai berbagai disiplin ilmu. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali pada akhirnya dikenal sebagai teolog Muslim, faqih dan sufi sekaligus sebagai tokoh dalam sejarah intelektual Islam yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat.

Keistimewaan pemikiran dan karya Imam Al-Ghazali yaitu memiliki pijakan kuat secara moral ataupun etika agama. Hal tersebut juga mendasari teori-teori kemanusiaan, seperti As-Syaukah (kekuatan) yang membahas pengelolaan hubungan antara rezim atau pemimpin terhadap rakyatnya khususnya etnis minoritas. Menurut Imam Al-Ghazali, konsepsi Asy-Syaukah menghendaki rakyatnya untuk melakukan perlawanan terhadap penguasa yang dinilai zalim terhadapnya. Namun, upaya tersebut harus didasarkan pada aspek kekuatan yang dimiliki oleh rakyat tersebut. Memang tujuan akhir yang akan dicapai adalah kemaslahatan. Jika dalam mencapai kemaslahatan tersebut justru lebih banyak ditemukan mudaratnya (keburukan), maka pilihan untuk melawan penguasa bukan menjadi pilihan utama bagi mereka.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mengkaji pemikiran Imam Al-Ghazali yang difokuskan pada konsep As-syaukah (kekuatan) dengan pokok masalah sebagai berikut: **“Mengapa politik separatisme tidak efektif dalam perspektif As-syaukah Imam Al-Ghazali?”**

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang:

1. Untuk menganalisis ekspresi politik separatisme Uyghur yang menimbulkan permasalahan keamanan bagi Tiongkok dan etnis Uyghur.
2. Untuk mengeksplorasi pendekatan keagamaan sebagai bentuk manajemen konflik sosial.

## **1.4. Kontribusi Penelitian**

Kontribusi penelitian pada dasarnya merupakan harapan bagi peneliti agar temuannya dapat bermanfaat secara teoritis baik dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan maupun secara praktis yaitu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

1. Manfaat teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dalam bidang dakwah dan politik Islam.

## 2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi *policy recommendation* untuk digunakan semua pihak yang melakukan kegiatan pengelolaan konflik sosial khususnya bagi etnis Uyghur dengan pemerintah Tiongkok.

### 1.5. Studi Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu telah ditelusuri terkait konflik etnis Uyghur dan pemerintah Tiongkok. Dalam penelitian "*China's "War on Terror" in Xinjiang: Human Security and the Causes of Violent Uighur Separatism*" (M. Clarke, 2008). Dalam tulisannya Clarke menjelaskan relasi yang dibentuk antara etnis Uyghur dan kelompok terorisme khususnya di wilayah Asia Selatan. Clarke juga beranggapan bahwa gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh etnis Uyghur terhadap pemerintah Tiongkok merupakan gerakan terorisme. Sehingga Clarke menemukan bahwa kelompok terorisme di Turki dan Afghanistan memiliki relasi dengan beberapa kelompok pemberontak etnis Uyghur.

Sementara itu dalam "*The Hanification of Xinjiang, China: The Economic Effects of the Great Leap West*" membahas pengaruh ekonomi dari adanya *Great Leap West*. Berbagai upaya ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok memiliki tujuan meredakan ketegangan etnisitas di Xinjiang (Liu & Peters, 2017). Selanjutnya Liu dan Peters berpendapat juga bahwa terdapat manfaat ekonomi telah dirasakan dan dinikmati oleh seluruh penduduk di wilayah Xinjiang tanpa memandang perbedaan etnis, bahkan membantu dalam pengembangan daerah setempat.

Di sisi lain, menurut etnis Uyghur, kekayaan ekonomi hanya menguntungkan etnis Han saja. Sehingga klaim-klaim di atas terkait insentif ekonomi baik narasi yang dibentuk oleh pemerintah Tiongkok maupun etnis Uyghur. Dampak dari insentif ekonomi yang diberikan oleh pemerintah Tiongkok membantu pembangunan regional, sehingga dapat dipahami sebagai upaya untuk menghentikan gerakan separatisme. Maka konflik yang semakin melembaga ini disebabkan juga oleh faktor ekonomi.

Sementara konflik etnis Uyghur dengan pemerintah Tiongkok mampu mempengaruhi sikap-sikap negara. Dalam tulisan "*Indonesia di Antara Masalah*

*Etnis Rohingya dan Etnis Uyghur, 2014-2019*” menjelaskan perbedaan sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam merespon permasalahan etnis Rohingya dan etnis Uyghur (Pradityo, 2020). Dalam konteks krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya menyebabkan Indonesia terlibat secara aktif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut melalui pertemuan resmi dengan Aung San Suu Kyi untuk mendiskusikan resolusi konflik dan bantuan kemanusiaan.

Namun sikap Indonesia cenderung tidak seaktif seperti apa yang dilakukan kepada etnis Rohingya. Indonesia menganggap permasalahan separatisme etnis Uyghur dipandang pemerintah Indonesia sebagai permasalahan domestik, sehingga Indonesia tidak ingin terlibat lebih jauh. Walaupun demikian, kepentingan Indonesia cenderung lebih condong dalam memperkuat hubungan ekonomi dan perdagangan dengan pemerintah Tiongkok khususnya dalam hal investasi.

Selanjutnya dalam tulisan *“The Chinese vs Western Media Framing on Uyghur Conflict”* (Kurniawan et al., 2020) mengangkat topik tentang bagaimana isu konflik etnis Uyghur dikemas menjadi berita internasional. Dengan menggunakan pendekatan framing dan teori konstruktivisme untuk menarasikan berita konflik Uyghur oleh media Barat dan media Tiongkok. Tulisan ini mengemukakan bahwa media Barat dalam mengemas berita cenderung menggunakan bahasa yang senantiasa dapat membuat emosi bagi para pembacanya. Dengan begitu isu konflik Uyghur menjadi pemberitaan yang bersifat transnasional.

Adapun tren perubahan sikap dalam melihat isu Uyghur juga dipaparkan dalam *“Etnisitas dan Politik Luar Negeri: Respon Turki Terhadap Penindasan Etnis Uyghur di Xinjiang”* (F. A. S., 2019). Tulisan ini mengidentifikasi perubahan sikap Turki terhadap Tiongkok dalam kaitannya dengan penindasan etnis Uyghur. Penulis mengemukakan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang mendorong perubahan sikap Turki terhadap Tiongkok yakni faktor afektif, seperti kedekatan secara identitas, budaya dan agama. Namun terdapat perubahan sikap Turki yang awalnya mengecam tindakan penindasan oleh pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uyghur. Perubahan tersebut dilandasi dengan faktor politik domestik, keuntungan ekonomi, dan kondisi internasional.

Kompleksitas permasalahan Uyghur berkaitan dengan kedaulatan dan keamanan negara. Gagasan tersebut tertuang dalam “*Central Asia as a Regional Security Complex from the Perspective of Realism, Liberalism and Constructivism*” (Pratama, 2013). Menurut Pratama masalah keamanan utama dalam hal ini gerakan kelompok ekstrimisme, etno-nasionalisme dan dukungan finansial untuk kelompok separatis. Sehingga pemerintah Tiongkok merasa terancam terhadap separatis Uyghur yang secara agama dan etnis lebih dekat dengan kawasan Asia Tengah. Wacana ini tentu menjadi perhatian dari *Shanghai Cooperation Organisations* (SCO) untuk mengkonstruksikan masalah separatisme dan terorisme sebagai ancaman utama keamanan domestik dan stabilitas kawasan Asia Tengah.

Sementara itu dalam memperjuangkan kepentingan Uyghur dapat dilakukan melalui melibatkan diaspora Uyghur. Hal tersebut disampaikan dalam “*Diaspora Uyghur dan Hak Sipil di Xinjiang Cina*” yang membahas upaya-upaya yang dilakukan komunitas diaspora Uyghur khususnya Jerman dalam memperjuangkan hak asasi manusia etnis Uyghur (Hidayat, 2013). Adapun berbagai strategi yang dilakukan oleh komunitas tersebut diantaranya melalui advokasi dan bentuk propaganda.

Usaha diaspora Uyghur Jerman dapat dilihat dengan adanya *World Uyghur Congress* (WUC) yang memiliki fungsi sebagai advokat bagi etnis Uyghur dengan tujuan untuk melobi para pembuat kebijakan di negara-negara yang mereka kunjungi, organisasi internasional dan media internasional. Selain itu, WUC telah memiliki berbagai jaringan yang tersebar luas di 18 negara (Chen, 2012). Bentuk propaganda oleh WUC yaitu counter-narasi dari apa yang dipropagandakan pemerintah Tiongkok.

Dalam perkembangannya pemerintah Tiongkok dalam mengatasi permasalahan etnis Uyghur dengan tindakan yang dianggap anarkis dan dinilai menindas etnis minoritas tersebut. Hal ini dapat dicermati dalam “*Repression, opportunity, and innovation: The evolution of terrorism in Xinjiang, China*” (Tschantret, 2018). Tschantret mengelaborasi terkait hubungan antara penindasan dengan bentuk paling ekstrem dari adanya perbedaan pendapat yakni terorisme. Pada awalnya berhasil untuk membatasi penggunaan oportunistik terorisme.



Namun di masa yang akan datang terdapat peluang politik baru yang tentu akan memfasilitasi gerakan separatis untuk melakukan suatu inovasi.

Sementara pemerintah Tiongkok memutuskan untuk menciptakan Undang-Undang sebagai respon separatisme Uyghur di Xinjiang. Hal ini dapat dibuktikan dalam "*International Rule of Law: China-Uyghur Crisis*" (Gatimi, 2013). Tulisan ini menjelaskan implementasi dari pengadopsian Undang-Undang Anti Terorisme oleh pemerintah Tiongkok. Secara eksplisit kebijakan kontraterorisme diterapkan secara khusus di wilayah otonomi Xinjiang. Kemudian kebijakan ini dimaksudkan untuk mengadakan pusat pendidikan (kamp pelatihan) dalam lingkup yang lebih luas dengan menahan etnis Uyghur.

Tren berbeda menjelaskan bahwa selama ini kekerasan oleh etnis Uyghur dipicu oleh rasa frustrasi akibat aspirasinya tidak didengar oleh pemerintah Tiongkok. Hal tersebut dijelaskan dalam "*Historical-Sociological Background of the Relationship between China and Xinjiang Region*" (Deng & Valle de Frutos, 2019). Lebih lanjut, Deng dan Frutos memaparkan bahwa kekerasan dan separatisme Uyghur dapat dipahami sebagai bentuk perlawanan putus asa dan semakin maraknya aksi terorisme. Sehingga konflik yang terjadi ini menempatkan pada Xinjiang dalam konteks nasionalisme Tiongkok dengan gerakan kemerdekaan Uyghur.

Gagasan yang berbeda disampaikan dalam "*Social Mobility of Uighur Population in Mainland China: A Comparative Perspective*" (Guo & Attané, 2019). Guo dan Attané memaparkan perbandingan perkembangan masyarakat antara etnis Han dengan Uyghur di Xinjiang. Permasalahan yang terjadi di Xinjiang adalah merujuk pada kelas sosial. Sebagai contoh pendapatan kerja etnis Uyghur masih sangat rendah dibandingkan dengan etnis Han. Faktor tersebut berperan dalam menciptakan ketegangan antar kedua etnis tersebut.

Adapun dalam tulisan lainnya "*What Explains the Rise of Majority-Minority Tensions and Conflict in Xinjiang?*" (Hasmath, 2019). Hasmath menjelaskan bahwa pemerintah Tiongkok memberikan gambaran terhadap etnis minoritas, misalnya Uyghur yang rentan terhadap kemiskinan dan kebanyakan dari mereka juga buta huruf bahkan dikhawatirkan mendapatkan diskriminasi dari etnis Han. Atas dasar inilah pemerintah Tiongkok diharuskan untuk mengontrol

secara penuh wilayah Xinjiang sebagai bentuk pengendalian warga di Xinjiang agar tidak kembali terjadi kerusuhan.

Argumentasi menarik juga disampaikan dalam artikel "*Understanding Uyghur Terrorism: The Human Needs Theory*" (McGrath & Matusitz, 2020). McGrath & Matusitz menegaskan bahwa teroris Uyghur muncul sebagai gerakan kekerasan disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya. Kemudian penindasan yang mereka alami juga dikarenakan faktor identitas yang diambil secara paksa oleh Tiongkok bahkan etnis Uyghur juga kurang mendapatkan perhatian.

Selanjutnya dalam "*Advancing "Ethnic Unity and "De-Extremization": Ideational Governance in Xinjiang under "New Circumstance"*" menyimpulkan pengaturan nilai-nilai, kepercayaan dan loyalitas etnis Uyghur yang bertujuan untuk menjaga stabilitas Tiongkok (Klimeš, 2018). Perhatian utama Tiongkok yaitu mengenai pentingnya aspek geopolitik dan dimensi keamanan di Xinjiang dengan menggunakan pendekatan kebijakan. Pembentukan kebijakan-kebijakan dimaksudkan untuk menjadi legitimasi untuk menanamkan nilai-nilai politik yang diinginkan oleh pemerintah Tiongkok.

Kemudian dalam tulisan "*The Uighurs Versus the Chinese Government: An Application of Conflict Theory*" memaparkan bahwa konflik antar kelompok dilatarbelakangi oleh dominasi sebuah kelompok atas keberadaan kelompok lainnya (Terhune & Matusitz, 2016). Sehingga menimbulkan diskriminasi bagi kelompok minoritas. Konsekuensinya, Uyghur bertekad untuk menciptakan negara merdeka dengan melakukan pemberontakan dan kekerasan yang dinilai oleh Tiongkok sebagai teroris.

Pandangan berbeda disampaikan dalam "*Social construction of ethnic identity and conflict: The cases of the chechen and the Uighur*" yang menegaskan bagaimana hubungan dan identitas antar etnis yang mengalami dinamika yang cukup kompleks mulai dari kebencian dan tindakan intoleransi (Li & Niemann, 2016). Di satu sisi hubungan antara pemerintah dengan penduduk lokal yang awalnya tidak harmonis pada akhirnya telah memasuki perdamaian, misalnya Rusia dengan Chechnya.

Di sisi lain, kompleksitas hubungan yang ditandai dengan semakin meningkatnya ketegangan di Xinjiang dapat menimbulkan problem keamanan manusia. Maka dari itu konflik terjadi sebelumnya merupakan akibat dari warisan sejarah dan kekuatan sosial. Dengan demikian, kuatnya marginalisasi menimbulkan kemarahan dari Muslim Uyghur.

Sementara itu dalam *“Holding China’s West: Explaining CCP Strategies of Rule in Tibet and Xinjiang”* menjelaskan *status quo* kondisi politik, ekonomi dan budaya di wilayah minoritas, kekuatan militer yang relatif dan preferensi kepemimpinan (Horowitz & Yu, 2015). Namun yang paling menonjol adalah mengenai preferensi para pemimpin Tiongkok dari waktu ke waktu dan dari dimensi kebijakan untuk mengatasi ancaman pemisahan diri di Xinjiang.

Sedangkan dalam artikel *“Uyghur and China in The American Media Discourse: A Critical Analysis of CNN News Articles”* memfokuskan pada analisis konten dari media CNN Internasional yang berkaitan dengan isu Uyghur (Prayudha & Fawwaz, 2020). Dalam artian subjek yang digunakan sebagai konten dalam berita tersebut yaitu isu Uyghur. Sehingga isu Uyghur menjadi representasi teks berita dan relasi antar partisipan dalam saluran berita CNN tersebut.

Memang isu Uyghur telah menjadi perbincangan internasional baik di negara maupun media internasional. Namun dalam konteks media CNN seringkali menempatkan fitur formalitas dan kosa kata yang kabur untuk memblokir dan mengaburkan nilai-nilai negatif dari pembaca ke Tiongkok itu sendiri. Sehingga hubungan di sini yaitu penyajian oleh CNN ke Tiongkok daripada CNN ke Uyghur. Hal ini merupakan cerminan dari status dan kekuatan Tiongkok di dunia internasional.

Dengan demikian berbagai penelitian terdahulu banyak membahas mengenai konflik antara pemerintah Tiongkok yang diaktualisasikan dengan gerakan separatisme dan pemberontakan yang lebih dikembangkan dengan narasi kontraterorisisme yang menjadi legitimasi pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uyghur. Sehingga fokus penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana seharusnya ekspresi politik etnis Uyghur terhadap preferensi separatisme untuk dievaluasi. Dengan maksud, penelitian ini akan menawarkan berbagai alternatif melalui pendekatan keagamaan dalam mensikapi konflik yang

semakin bergejolak dan melembaga berdasarkan perspektif As-Syaukah (kekuatan) dari Imam Al-Ghazali.

Dalam rangka memudahkan untuk meninjau kajian penelitian terdahulu terkait topik-topik yang berkaitan dengan isu konflik Uyghur, maka akan dilakukan klusterisasi. **Kluster 1 memfokuskan penelitian pada perkembangan konflik etnis Uyghur dengan pemerintah Tiongkok yang disebabkan oleh faktor ekonomi, diskriminasi dan permasalahan tidak terpenuhinya nilai-nilai HAM.** Adapun artikel yang membahas hal tersebut sebagai berikut: *“The Hanification of Xinjiang, China: The Economic Effects of the Great Leap West”*, *“Social Mobility of Uighur Population in Mainland China: A Comparative Perspective”*, *“What Explains the Rise of Majority-Minority Tensions and Conflict in Xinjiang?”*, *“Understanding Uyghur Terrorism: The Human Needs Theory”* dan *“The Uighurs Versus the Chinese Government: An Application of Conflict Theory”*

Selanjutnya **kluster 2 memfokuskan penelitian pada bahwasannya separatisme Uyghur merupakan ancaman keamanan Tiongkok dan pemerintah Tiongkok dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan menciptakan Undang-Undang Anti Terorisme, kebijakan, warisan sejarah dan sekuritisasi isu keamanan.** Lebih lanjut artikel yang menitikberatkan pembahasannya terhadap hal tersebut yaitu: *“China’s “War on Terror” in Xinjiang: Human Security and the Causes of Violent Uighur Separatism”*, *“Central Asia as a Regional Security Complex from the Perspective of Realism, Liberalism and Constructivism”*, *“Repression, opportunity, and innovation: The evolution of terrorism in Xinjiang, China”*, *“International Rule of Law: China-Uyghur Crisis”*, *“Historical-Sociological Background of the Relationship between China and Xinjiang Region”*, *“Advancing “Ethnic Unity and “De-Extremization”: Ideational Governance in Xinjiang under “New Circumstance”*, *“Social construction of ethnic identity and conflict: The cases of the chechen and the Uighur”* dan *“Holding China’s West: Explaining CCP Strategies of Rule in Tibet and Xinjiang”*

Kemudian **kluster 3 memfokuskan penelitian pada aspek respon dunia internasional yaitu berkaitan dengan perubahan sikap dari negara-negara dalam konteks konflik Uyghur.** Selain itu juga terdapat narasi yang

**dibangun di media internasional untuk mencermati isu konflik Uyghur dan upaya advokasi dan propaganda dari diaspora Uyghur untuk mencapai kepentingannya.** Untuk itu terdapat beberapa artikel yang mencermati hal tersebut diantaranya: *“Indonesia di Antara Masalah Etnis Rohingya dan Etnis Uighur, 2014-2019”*, *“The Chinese vs Western Media Framing on Uyghur Conflict”*, *“Etnisitas dan Politik Luar Negeri: Respon Turki Terhadap Penindasan etnis Uyghur di Xinjiang”*, *“Diaspora Uyghur dan Hak Sipil di Xinjiang Cina”* dan *“Uyghur and China in The American Media Discourse: A Critical Analysis of CNN News Articles”*.

Berdasarkan pemaparan di atas masih belum ditemukan penelitian yang berkaitan dengan evaluasi ekspresi politik Uyghur berdasarkan pendekatan keagamaan. Sehingga hal ini cukup penting mengingat bahwa konflik Uyghur dengan pemerintah Tiongkok belum menemukan solusi konstruktif. Untuk itu pendekatan keagamaan diharapkan dapat mencermati konflik *intra-state* tersebut dan menjadi bagian dari solusi dalam mengelola dan memajemen dinamika pelembagaan konflik yang tak kunjung usai.

## **1.6. Kerangka Teori/Konseptual**

### **1.6.1. As-Syaukah Imam Al-Ghazali**

Pada dasarnya Imam Al-Ghazali memberikan perbedaan terkait “usaha pemisahan diri komunitas Islam” yang dipahami sebagai tindakan amar ma’ruf nahi munkar dalam konsepsi asy-syaukah (kekuatan), dengan tindakan “pemberontakan” terhadap pemerintah atau rezim yang sah (bughat) (Ahmad, 1975, p. 326). Dengan begitu dalam perspektif Islam itu sendiri, membedakan dua makna sangat penting (esensial), karena untuk kategori pertama dalam hal ini amar ma’ruf nahi munkar dapat dinyatakan sebagai kewajiban (*obligations*). Sementara itu kategori yang kedua yaitu pemberontakan justru dinyatakan sebagai perbuatan yang “diharamkan”. Bahkan dalam batasan tertentu akan dianggap sebagai tindakan murtad (*riddah*).

Selain itu menurut Imam Al-Ghazali, konsepsi asy-syaukah dapat dimaknai sebagai bentuk pengukuran kekuatan dari suatu kelompok masyarakat (Islam) untuk menegakkan kebenaran dan keadilan yang berhadapan dengan rezim yang telah terbukti zalim dan mengingkari hukum-hukum Islam. Memang

pemerintah yang zalim pernah dikabarkan oleh Rasulullah S.A.W akan “menjadi fenomena” dalam kelompok atau komunitas Islam setelah runtuhnya pemerintahan yang bermetodekan kaidah kenabian (khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah) (Tanjung, 2018).

Dalam artian, apabila usaha dalam melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar dalam bentuk konfrontasi terdukung oleh segala kekuatan yang memadai untuk mengatasi “kekuatan negara” dalam waktu yang singkat. Maka aktivitas amar ma’ruf dalam bentuk konfrontasi secara langsung terhadap kekuatan zalim harus segera dideklarasikan dan dilaksanakan dengan sedemikian rupa. Akan tetapi jika dalam “proses adu kekuatan” tersebut tidak terdapat keyakinan akan terkuasainya rezim atau penguasa yang zalim dalam waktu yang singkat, maka aktivitas konfrontasi bukan sebagai preferensi utama.

Hal penting lainnya yang menarik untuk diketahui bahwasannya kapan batas toleransi waktunya? Dalam gagasan Imam Al-Ghazali, batas waktu toleransi “hampir mirip” dengan batasan waktu sebuah kontrak antara darul ahdi. Maksud darul ahdi yaitu daerah yang terikat kontrak dengan darul Islam untuk saling hidup berdampingan secara damai (*peaceful co-existence*), yakni 10 tahun. Apabila politik konfrontasi secara langsung dilakukan lebih dari 10 tahun dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang jauh lebih banyak atas nama suatu harga diri, maka politik konfrontasi sedemikian rupa harus dihindari.

Secara garis besar gagasan Imam Al-Ghazali tidak menutup kemungkinan tindakan revolusi terhadap pemimpin yang dianggap zalim. Sehingga dengan sangat hati-hati, Al-Ghazali memberikan pertimbangan kepada rakyat untuk memilih satu dari dua pilihan: (Ahmad, 1975, p. 325).

- a. *‘azal*, dalam artian rakyat menggunakan haknya untuk memecat Kepala Negara atau menjatuhkan pemerintah, jika mereka cukup kemampuan (syaukah) untuk mengembalikan keamanan.
- b. *‘uzlah*, yakni rakyat itu menjauhkan diri bersikap non-kooperasi terhadap Kepala Negara atau pemerintah tersebut, apabila mereka tidak cukup mempunyai kemampuan.

Untuk itu, Al-Ghazali dengan sengaja menggunakan perkataan “syaukah” sebagai syarat perlawanan rakyat, bukan perkataan “senjata” karena perkataan tersebut lebih megandung arti “pengaruh” atau “kemampuan” yang tidak memerlukan pertumpahan darah. Akan tetapi, jika situasi dan keadaan perlawanan begitu rupa sehingga pertumbuhan darah tidak dapat dihindarkan, maka haruslah diusahakan korbannya sesedikit mungkin, dan segera dijaminnya kembali keamanan.

Permasalahan inilah yang kemudian dianggap oleh Al-Ghazali sulit dan sukar. Sehingga memerlukan organisasi perjuangan yang kuat dan cukup teratur yang tentunya dapat mengendalikan perlawanan ke jalan yang lebih aman dan cepat. Hal ini disampaikan juga dalam hadits Nabi yang berbunyi:

*“Kepala Negara yang zalim masih lebih baik daripada kekacauan. Keduanya tidaklah baik, akan tetapi di antara hal-hal yang tidak baik itu orang harus dapat memilihnya”* (Ahmad, 1975, p. 325).

Selanjutnya perlawanan terhadap seorang Kepala Negara melanggar atau suatu pemerintah yang zalim, harus dilakukan secara legal oleh wakil-wakil rakyat melalui majlis-majlis. Jika cara ini tidak membawa hasil yang memuaskan, barulah rakyat membentuk organisasi yang teratur yang memiliki “syaukah”. Semakin besar syaukahnya kepada rakyat, maka semakin kuatlah perlawanannya. Kemudian barulah dilakukan adu syaukah dengan menghindari sebaik-baiknya penumpahan darah. Tetapi jika penumpahan darah tidak dapat dihindarkan, haruslah diusahakan sesedikit mungkin memakan korban.

Memang bahwasannya rakyat dapat menggunakan hak ‘*azal*’ dan Al-Ghazali menganjurkan tugas total dan khusus “*amar ma’ruf nahi munkar*” kepada seluruh rakyat dan para pemimpin dan Ulama yang harus dengan berani mengatakan kebenaran di hadapan pemerintah yang zalim, telah membenarkan hukum revolusi yang menegakkan keadilan dan membenarkan kezaliman. Hal penting lainnya bahwa kalau organisasi rakyat tidak cukup mempunyai “syaukah”, tenaga perjuangannya tidak sanggup melakukan revolusi dengan sebaik-baiknya, maka Al-Ghazali memberikan nasehat agar rakyat menempuh jalan yang kedua, yaitu “*uzlah*”, bersikap menjauhkan diri dan melakukan non-kooperasi.

Dalam kaitannya dengan topik penelitian di atas bahwa selama ini hubungan antara pemerintah Tiongkok khususnya dengan Muslim Uyghur di wilayah otonomi Xinjiang adalah konfliktual. Bahkan dalam perkembangannya konflik tersebut menjadi kekerasan baik yang sifatnya fisik maupun non fisik. Memang Uyghur merupakan etnis minoritas di Tiongkok dan mereka menerima tekanan lebih besar dari aparat pemerintah yang berpusat di Beijing. Selama ini etnis Uyghur menyatakan bahwa pemerintah Tiongkok merupakan rezim yang zalim karena telah mengintimidasi terhadap mereka. Misalnya Beijing telah dituduh menginternir banyak warga minoritas Muslim Uyghur untuk dididik kembali secara “paksa” terkait dengan keyakinan yang mereka anut dan melakukan diskriminasi. Sehingga dampak yang dirasakan menimbulkan kesengsaraan. Sehingga dalam pandangan Uyghur, pemerintah Tiongkok dianggap “kafir”

Bagi Uyghur, aktivitas perlawanan kepada pemerintah Tiongkok adalah aktivitas suci sebagai amar ma'ruf. Maka barang siapa yang gugur dalam perjuangan kemerdekaan Uyghur akan mendapatkan pahala syahid. Suatu kedudukan yang terhormat dalam pandangan masyarakat Islam. Sementara itu dalam perspektif pemerintah Tiongkok, melihat bahwa Muslim Uyghur merupakan bagian dari separatisme atau pembangkangan terhadap tertib sosial dan politik. Maka dalam konteks pemikiran Islam, tindakan Uyghur bisa dihukumi dalam bab pemberontakan dan menumpahkan darah pemberontak adalah halal. Sehingga dalam batas tertentu dari kaidah fiqh, tindakan represif pemerintah Tiongkok untuk menekan Uyghur menjadi benar adanya.

Kemudian memunculkan pola untuk saling mengklaim kebenaran inilah yang kemudian menimbulkan ikhtiar berfikir lebih. Sehingga menghasilkan pertanyaan siapakah yang sebenarnya benar, Uyghur atau pemerintah Tiongkok. Selain itu bagaimana mempertemukan kedua pihak yang saling benar dalam konteks islah (perbaikan) dan tampaknya tindakan untuk menghentikan gerakan separatisme merupakan pilihan yang rasional. Sebab upaya pemisahan diri sebagai bagian amar ma'ruf nahi mungkar tidak pernah mendapatkan momentum yang signifikan untuk mendapatkan kemaslahatan khususnya bagi komunitas Islam Uyghur. Dalam artian kebenaran Islam Uyghur adalah hanya relatif bagi mereka sendiri dan masyarakat umum Tiongkok.



Dalam menilai daya dukung yang dimiliki oleh kelompok atau komunitas yang dipahami sebagai instrumen dalam mencapai kepentingannya, maka akan dicermati lebih jauh dengan analisis *strength, weakness, opportunities* dan *threat* (SWOT) (Gurel & Tat, 2017). Lebih lanjut kekuatan dapat dilihat dari sumber daya (*resources*) yang dimiliki oleh suatu komunitas, seperti jaringan dan sumber daya manusia. Kemudian kelemahan dapat dipahami sebagai hambatan yang dihadapi oleh sebuah kelompok, seperti kekuatan kelompok lain yang dominan khususnya modal. Sedangkan kesempatan mengacu pada faktor eksternal yang dapat berkontribusi dalam mengembangkan dan mensukseskan kepentingan organisasinya. Sementara itu ancaman merujuk pada faktor eksternal yang berpotensi sulit untuk dikendalikan dengan sedemikian rupa.

Dalam kaitannya dengan konflik pemerintah Tiongkok dan etnis Uyghur, maka masing-masing pihak umumnya memiliki kepentingannya yang ingin didapatkan dengan maksimal. Akan tetapi penting untuk melihat sejauh mana daya dukung yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang berkonflik. Jika memang kekuatan dan kesempatan yang memadai dimiliki etnis Uyghur yang mampu menjamin kepentingannya, maka pilihan memisahkan diri dari Tiongkok dapat dibenarkan. Namun apabila akumulasi dari kekuatan dengan kesempatan yang dimiliki jauh lebih kecil dibandingkan dengan ancaman dan kelemahan, maka pilihan separatisme tidak dibenarkan dan tidak akan tercapai.

## **1.7. Metodologi Penelitian**

### **1.7.1. Jenis Penelitian**

Dalam tulisan ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dalam menganalisa masalah di atas mengingat bahwa objek penelitian tersebut membutuhkan interaksi sosial antar individu. Adapun secara makna penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur dalam penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari berbagai perilaku seseorang yang diamati (Moloeng, 1994). Dengan kata lain untuk mendapatkan gambaran secara umum terkait masalah yang akan dibahas dalam hal ini mengapa ekspresi politik separatisme Uyghur tidak efektif berdasarkan pendekatan As-Syaukah (kekuatan) Imam Al-Ghazali (Casterle et al., 2012).

Dalam penelitian kualitatif memfokuskan pada pengamatan aktivitas-aktivitas manusia untuk memperoleh suatu kebenaran dan keaslian terhadap objek

yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif juga dikenal dengan sifat penelitian dalam hal ini adalah deskriptif. Maksud dari deskriptif adalah penggambaran secara mendalam yang berkaitan dengan situasi tertentu. Mengingat sifat ini maka penelitian kualitatif tidak berupaya untuk menguji hipotesis. Bukan berarti bahwa penelitian ini tidak memiliki asumsi awal yang menjadi permasalahan dalam penelitian. Namun penelitian kualitatif mencoba untuk mencari kepastian terhadap objek yang diteliti, sehingga tidak ada usaha untuk menguji hipotesis.

Maka dari itu dalam penelitian ini laporan yang ditulis adalah berupa narasi cerita yang menggambarkan secara luas objek yang diamati. Sehingga laporan dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif. Lebih lanjut penggunaan analisis deskriptif tentunya akan memudahkan pembaca dalam memahami proses pengumpulan data yang dapat mendukung argumen penulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan demikian, setiap kasus atau fenomena dalam kehidupan masyarakat yang ada akan diperlakukan sebagai suatu entitas yang unik.

### **1.7.2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode studi kepustakaan (*library research*) melalui penelusuran sumber data sekunder yang meliputi buku, jurnal, siaran pers, pernyataan pejabat dan website yang tentunya memuat informasi terkait topik penelitian di atas (Strauss & Corbin, 1998). Selain itu metode kepustakaan dianggap penting, mengingat bahwa penelusuran data melalui dokumen akan menjadi langkah awal peneliti dalam menganalisis data atau informasi penting yang akan menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Hal yang terpenting dalam mendapatkan informasi, peneliti harus memastikan bahwa data atau informasi yang didapatkan mengandung suatu unsur kebenaran (*validitas*) yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai sumber dalam penelitian ini.

Hal penting lainnya adalah tujuan diperolehnya data atau informasi melalui data sekunder adalah sebagai usaha penulis dalam mengidentifikasi dinamika hubungan antara etnis Uyghur dengan pemerintah Tiongkok yang selama ini masih menimbulkan konflik. Oleh karena itu diharapkan informasi yang didapatkan oleh peneliti melalui studi kepustakaan dapat membantu pembaca dalam memahami ekspresi politik etnis Uyghur di Xinjiang yang

memilih untuk menghadapi dominasi pemerintah Tiongkok yang akan dicermati melalui perspektif As-Syaukah dari pemikiran Imam Al-Ghazali.

Sehingga penting untuk melakukan manajemen konflik antara pemerintah dengan penduduknya sendiri. Metode kepustakaan tentunya menjadi bagian yang penting dalam penelitian kualitatif karena menjadi salah satu rujukan setiap penulis yang menggunakan metode penelitian kualitatif dalam merumuskan sebuah penelitian yang pada akhirnya disajikan dalam bentuk narasi, sehingga dalam hal ini memudahkan peneliti dalam mempersiapkan instrumen-instrumen penelitian.

### **3. Teknik Analisis Data**

Terkait proses dalam penelitian ini, peneliti cenderung melakukan analisa melalui beberapa tahap yang mengacu pada gagasan yang disampaikan Creswell yakni mempersiapkan data untuk diolah dan dokumentasi data-data lainnya yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan (Creswell, 2003). Tahap awal dalam menganalisis data adalah pengumpulan data yang telah didapatkan oleh peneliti yang memuat informasi terkait objek penelitian.

Langkah kedua setelah proses pengumpulan data, penulis mencoba untuk membaca keseluruhan data atau informasi yang bertujuan untuk memahami ide-ide atau gagasan yang tersirat dalam data dan perlu diketahui dalam tahap pengumpulan data, peneliti juga mencatat informasi penting untuk melakukan kategorisasi. Langkah ketiga dalam penelitian ini adalah melakukan pemetaan (*coding*) terhadap data-data yang diperoleh penulis dengan melakukan penamaan diantaranya konflik etnis Uyghur dan pemerintah Tiongkok, Dinamika Hubungan etnis Uyghur di Xinjian dengan pemerintah Tiongkok, Separatisme Uyghur, Respon Dunia Internasional Terhadap Isu Uyghur dan Evaluasi Ekpresi Politik Islam Uyghur.

Tahapan ini juga dapat dikatakan sebagai tahapan reduksi data yang berarti bagian dari kegiatan analisis, sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, mana yang harus dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang berkembang dan semua itu merupakan pilihan-pilihan yang analitis (Idrus, 2007).

Selanjutnya peneliti mencoba untuk membuat sebuah analisa dalam bentuk deskripsi yang disesuaikan atas hasil pemetaan data tersebut yang juga bertujuan sebagai langkah dalam menentukan penarikan kesimpulan terhadap objek dalam penelitian ini. Tahap kelima yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menuliskan hasil deskripsi terhadap temuan-temuan yang diperoleh ketika proses pengembangan narasi dan dalam tahap ini peneliti juga mencoba untuk melakukan interpretasi terhadap berbagai temuan dari penelitian ini. Pada akhirnya penelitian ini memberikan keilmuan baru mengenai manajemen konflik berbasis pendekatan keagamaan.

### **1.8. Hipotesa**

Berikut perumusan hipotesis dari penelitian ini adalah politik separatisme Uyghur tidak efektif dalam perspektif As-Syaukah Imam Al-Ghazali karena terdapat ketimpangan kekuatan militer antara kombatan Uyghur dengan pemerintah Tiongkok, rendahnya dukungan internasional dan dampak-dampak kekerasan yang ditimbulkan.

### **1.9. Sistematika Penulisan**

**Bab 1** akan berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, studi pustaka, kerangka teori/konseptualisasi dan hipotesa.

**Bab 2** akan berisi terkait dinamika eksistensi politik etnis Uyghur sebagai kelompok minoritas di Xinjiang, Tiongkok.

**Bab 3** akan berisi terkait dinamika hubungan konflik pemerintah Tiongkok dan etnis Uyghur.

**Bab 4** akan berisi terkait ketidakefektifan politik separatisme Uyghur dalam perspektif As-syaukah Imam Al-Ghazali dan pembuktian hipotesa.

**Bab 5** akan berisi terkait kesimpulan.